

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEMUNGKINAN KORUPSI DI KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) : PERSPEKTIF GONE THEORY

Adinda Rachmania Prabandari, Wahid Abdulrahman

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Korupsi dalam birokrasi daerah masih menjadi tantangan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi risiko perilaku koruptif Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan perspektif *GONE Theory* (*Greed*, *Opportunity*, *Need*, dan *Exposes*). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui survei terhadap 86 ASN dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif serta tabulasi silang berdasarkan jabatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor *Greed* dan *Opportunity* berada pada kategori sedang, sedangkan *Need* dan *Exposes* dalam analisis tabulasi silang menunjukkan variasi antarjabatan. Persepsi terhadap *Exposes* yang relatif tinggi mengindikasikan adanya ketidakmerataan efektivitas pengawasan dan pengungkapan pelanggaran dalam organisasi. Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa potensi risiko korupsi di lingkungan birokrasi tidak semata-mata ditentukan oleh moralitas individu, tetapi merupakan hasil interaksi antara dorongan internal aparatur dan peluang struktural yang tersedia dalam organisasi. Dengan demikian, pencegahan korupsi memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga pada penguatan sistem pengawasan dan integritas organisasi.

Kata kunci: Korupsi, *GONE Theory*, ASN, Risiko Korupsi

ABSTRACT

Corruption within local bureaucracies remains a significant challenge in Indonesia's public governance. This study aims to analyze the potential risk of corruptive behavior among Civil Servants (Aparatur Sipil Negara/ASN) in the Bekasi City Government based on the GONE Theory framework (Greed, Opportunity, Need, and Exposes). The research employs a descriptive quantitative approach through a survey of 86 civil servants and is analyzed using descriptive statistics and cross-tabulation based on position levels. The findings indicate that Greed and Opportunity fall within the moderate category, while Need and Exposes vary across organizational positions. The relatively high perception of Exposes suggests uneven effectiveness in supervision and misconduct disclosure mechanisms within the organization. The principal finding of this study confirms that the potential risk of corruption in the bureaucracy is not determined solely by individual morality, but rather emerges from the interaction between internal motivations of civil servants and the structural opportunities available within the organization. Therefore, corruption prevention strategies should not rely exclusively on regulatory enforcement, but must also strengthen internal oversight systems and institutional integrity.

Keywords: *Corruption, GONE Theory, Civil Servants, Corruption Risk*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama dalam tata kelola pemerintahan yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam sektor publik, korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik, melemahkan kepercayaan masyarakat, serta menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Puanandini et al., 2025). Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana kebijakan publik memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, sehingga integritas dan profesionalitas aparatur menjadi prasyarat

penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa praktik penyimpangan di lingkungan birokrasi masih kerap terjadi. Berbagai laporan mengindikasikan bahwa korupsi tetap menjadi persoalan yang bersifat struktural sekaligus berulang dalam sistem pemerintahan Indonesia (Hasim, 2023). Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan stagnan, yang mencerminkan bahwa berbagai upaya pencegahan dan penindakan belum sepenuhnya menghasilkan perbaikan signifikan dalam tata kelola pemerintahan. Data penanganan kasus

korupsi juga menunjukkan bahwa jumlah perkara dan nilai kerugian negara masih berada pada angka yang memprihatinkan serta mengalami fluktuasi setiap tahun.

Gambar 1 Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia 2019 s/d 2023



Sumber : *Indonesia Corruption Watch*

Dalam konteks pemerintah daerah, kompleksitas struktur organisasi dan distribusi kewenangan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berpotensi menciptakan ruang terjadinya penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan integritas dan pengawasan yang efektif (Budiman, 2026). Struktur birokrasi yang melibatkan banyak aktor, kewenangan administratif, serta pengelolaan anggaran publik menjadikan pemerintah daerah sebagai salah satu sektor yang rentan terhadap praktik korupsi, terutama ketika pengawasan internal dan eksternal tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk melihat fenomena korupsi secara lebih kontekstual pada level

pemerintah daerah tertentu sebagai lokus empiris penelitian, guna memahami bagaimana faktor-faktor organisasi dan persepsi aparaturnya bekerja dalam lingkungan birokrasi yang spesifik

Berbagai pendekatan telah digunakan untuk menjelaskan penyebab korupsi, mulai dari pendekatan kultural, institusional, hingga ekonomi-politik. Namun, perkembangan teori menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat diperluas melalui *GONE Theory* yang diperkenalkan oleh Jack Bologne. Teori ini menambahkan dimensi *Greed* dan *Exposes*, sehingga faktor yang dianalisis mencakup *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan), dan *Exposes* (pengungkapan atau efektivitas sanksi).

Penggunaan *GONE Theory* dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai kerangka untuk memetakan kemungkinan terjadinya korupsi berdasarkan persepsi ASN. Pendekatan ini tidak semata-mata menempatkan korupsi sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai risiko perilaku yang dapat diidentifikasi melalui kombinasi faktor internal individu dan kondisi struktural organisasi.

Pemerintah Kota Bekasi dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kompleksitas organisasi serta intensitas pengelolaan program dan anggaran yang cukup besar. Persepsi ASN terhadap kondisi organisasi, peluang penyimpangan, tekanan kebutuhan, serta risiko pengawasan dan pengungkapan menjadi penting untuk dianalisis guna memperoleh gambaran mengenai tingkat kerentanan potensi korupsi di lingkungan birokrasi daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai tingkat faktor *Greed*, *Opportunity*, *Need*, dan *Exposes* berdasarkan persepsi Aparatur Sipil Negara sebagai dasar dalam memetakan kerentanan potensi terjadinya korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai perilaku dan persepsi ASN dalam konteks risiko korupsi di sektor publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif untuk memetakan kemungkinan terjadinya korupsi berdasarkan dimensi *Greed*, *Opportunity*, *Need*, dan *Exposes*

dalam kerangka *GONE Theory*. Analisis difokuskan pada persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terhadap keempat dimensi tersebut sebagai indikator kerentanan risiko korupsi.

Populasi penelitian adalah seluruh ASN pada perangkat daerah yang menjadi lokasi penelitian. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (e) sebesar 10%, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(D)^2}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh jumlah sampel sebanyak 86 responden. Untuk menjamin keterwakilan setiap kelompok dalam struktur organisasi, teknik pengambilan sampel menggunakan *stratified random sampling*.

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disusun berdasarkan operasionalisasi variabel dalam *GONE Theory*. skala Likert digunakan untuk mengukur tiap instrument pernyataan dengan 4 poin untuk setiap pernyataan, mulai dari 1 = Sangat Tidak setuju sampai 4 = Sangat Setuju. Data sekunder diperoleh dari

dokumen resmi dan literatur yang relevan untuk memperkuat konteks analisis.

Sebelum analisis dilakukan, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,70, sehingga dinyatakan reliabel dan konsisten sebagai alat ukur penelitian. Uji validitas menunjukkan seluruh item memiliki nilai korelasi lebih besar dari *r* tabel pada taraf signifikansi 0,05, sehingga dinyatakan valid.

Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk memperoleh nilai mean, distribusi frekuensi, dan standar deviasi masing-masing variabel. Untuk memberikan interpretasi yang lebih sistematis, skor rata-rata dikategorikan ke dalam tiga tingkat, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, berdasarkan interval kelas yang dihitung dari rentang skala pengukuran. Penentuan kategori dilakukan berdasarkan interval skala *Likert* empat poin dengan menggunakan rumus :

$$I = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Dengan demikian, kategorisasi variabel dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Nilai mean antara 1,00-1,99 dikategorikan **rendah**
- b. Nilai mean antara 2,00-2,99 dikategorikan **sedang**
- c. Nilai mean antara 3,00-4,00 dikategorikan **tinggi**

Selain itu, analisis tabulasi silang (*crosstab*) berdasarkan jabatan digunakan untuk mengidentifikasi variasi persepsi antar strata dalam struktur birokrasi. Seluruh proses pengolahan data dilakukan dengan bantuan *IBM SPSS Statistics*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kemungkinan terjadinya korupsi di kalangan ASN Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan perspektif *GONE Theory*. Rumusan masalah dijawab melalui analisis statistik deskriptif terhadap empat variabel, yaitu *Greed*, *Opportunity*, *Need*, dan *Exposes*.

Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
<i>Greed</i>	86	1,00	3,56	2,47	0,45
<i>Opportunity</i>	86	1,00	3,63	2,65	0,51
<i>Need</i>	86	1,17	4,00	2,26	0,62
<i>Exposes</i>	86	1,78	4,00	3,10	0,59

Sumber : Data Primer, 2026

a. Analisis Faktor *Greed*

Berdasarkan interval kategorisasi, nilai mean variabel *greed* berada pada kategori sedang. Meskipun tidak dominan, dimensi ini tetap menjadi elemen penting dalam pemetaan risiko karena dapat berinteraksi dengan variabel lainnya.

Melalui pendekatan kultural juga dapat dilihat bahwa kecenderungan *greed* tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai yang berkembang dalam lingkungan organisasi. Sehingga, jika dalam suatu organisasi lingkungan birokrasi terdapat toleransi terhadap praktik tertentu atau terdapat pemaknaan longgar terhadap batas antara kepentingan pribadi dan jabatan publik, maka dorongan internal seperti *Greed* berpotensi memperoleh justifikasi sosial.

b. Analisis Faktor *Opportunity*

Berdasarkan interval kategorisasi, nilai mean variabel *opportunity* berada pada kategori sedang. Temuan ini menunjukkan bahwa responden menilai adanya peluang atau kelemahan dalam sistem kerja dan pengawasan yang berpotensi membuka ruang terjadinya perilaku koruptif.

Rentang nilai yang cukup lebar mencerminkan variasi persepsi, namun standar deviasi yang moderat menunjukkan perbedaan jawaban masih dalam batas wajar. Hal ini mengindikasikan bahwa peluang korupsi dipersepsikan bukan semata sebagai persoalan individual, melainkan sebagai kecenderungan struktural.

Dalam perspektif *GONE Theory*, *Opportunity* merupakan faktor eksternal yang dapat memicu dorongan internal menjadi tindakan koruptif. Selama celah struktural dalam sistem masih ada, potensi kecurangan tetap terbuka. Pendekatan institusional dan ekonomi-politik peluang korupsi juga dapat dipahami sebagai konsekuensi dari relasi kekuasaan dalam organisasi. Jabatan yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya publik atau proses pengambilan keputusan cenderung memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi karena berada pada posisi strategis dalam struktur kekuasaan birokrasi.

c. Analisis Faktor *Need*

Berdasarkan interval kategorisasi, nilai mean variabel *need* berada pada kategori sedang. Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi atau keuangan diyakini ada hingga tingkat tertentu, namun

bukan merupakan faktor dominan dalam jawaban responden. Dalam perspektif *GONE Theory*, variabel *Need* berperan sebagai faktor pendorong tambahan yang dapat menunjukkan kecenderungan *Greed* Ketika individu menghadapi tekanan finansial.

Dalam pendekatan ekonomi-politik, tekanan kebutuhan tidak hanya dipahami sebagai persoalan ekonomi pribadi, tetapi juga sebagai refleksi dari posisi individu dalam struktur distribusi sumber daya dan akses dalam birokrasi. Perbedaan tingkat kesejahteraan, akses terhadap fasilitas jabatan, maupun peluang tambahan yang melekat pada posisi tertentu dapat menciptakan ketimpangan persepsi mengenai kebutuhan. Dengan demikian, variasi pada dimensi *Need* juga dapat dibaca sebagai konsekuensi dari struktur organisasi dan distribusi kekuasaan yang tidak sepenuhnya setara

d. Analisis Faktor *Exposes*

Berdasarkan interval kategorisasi, nilai mean variabel *exposes* berada pada kategori tinggi. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan faktor lain menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi kuat terhadap lemahnya pengungkapan

pelanggaran dan efektivitas hukuman lebih tinggi dibanding item lainnya.

Dalam perspektif *GONE Theory*, temuan ini menunjukkan bahwa persepsi tentang kemungkinan rendahnya pelanggaran diungkapkan, serta hukuman yang tidak sepadan, dianggap sebagai pengaruh yang cukup kuat terhadap kemungkinan terjadinya korupsi. Melalui pendekatan institusional ditunjukkan bahwa lemahnya persepsi terhadap pengungkapan tidak hanya berkaitan dengan faktor individual, tetapi mencerminkan efektivitas desain sistem pengawasan, mekanisme audit internal, dan konsistensi penegakan aturan dalam organisasi. Ketika akuntabilitas tidak ditegakkan secara konsisten, probabilitas sanksi menjadi tidak kredibel di mata aparat, sehingga kehilangan fungsi sebagai instrumen pengendali perilaku.

Dari perspektif kultural, kondisi tersebut berkaitan dengan terbentuknya norma organisasi yang mentoleransi pelanggaran atau memandang sanksi sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan. Nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi membentuk persepsi mengenai batas perilaku yang dapat diterima; oleh karena itu, lemahnya ekspektasi terhadap penegakan

sanksi berpotensi terinternalisasi sebagai bagian dari budaya birokrasi.

Analisis Tabulasi silang

Analisis tabulasi silang (*crosstab*) digunakan untuk melihat pola distribusi persepsi responden terhadap faktor *Greed*, *Opportunity*, *Need*, dan *Exposes* berdasarkan jabatan. Pemilihan jabatan sebagai variabel pembeda didasarkan pada pertimbangan teoritik bahwa jabatan berkaitan langsung dengan kewenangan, ruang diskresi, serta kedekatan terhadap sistem pengawasan.

a. Tabulasi silang jabatan dan *greed*

Tabel 2 *Crosstab* jabatan dan *greed*

Jabatan	Rendah	Sedang	Tinggi
Staff	0 (0%)	6 (100%)	0 (0%)
Fungsional	0 (0%)	8 (66,7%)	4 (33,3%)
Struktural	9 (17,6%)	41 (80,4%)	1 (2,0%)
Total	9 (13,0%)	55 (79,7%)	5 (7,2%)

Sumber : Output SPSS diolah penulis, 2026

Pola ini menegaskan bahwa tingkat keserakahan tidak meningkat secara linear seiring kenaikan hierarki jabatan. Jabatan fungsional, yang berkaitan dengan tanggung jawab teknis dan akses langsung pada proses administratif, justru menunjukkan proporsi orientasi keuntungan pribadi yang lebih besar dibanding jabatan struktural. Dalam

kerangka GONE Theory, *Greed* dipahami sebagai dorongan psikologis dan situasional yang dapat muncul di semua level jabatan. Dengan demikian, potensi korupsi tidak semata ditentukan oleh kekuasaan formal, tetapi juga oleh persepsi individu terhadap akses dan kontrol atas sumber daya.

b. Tabulasi silang jabatan dan *opportunity*

Tabel 3 *Crosstab* jabatan dan *opportunity*

Jabatan	Rendah	Sedang	Tinggi
Staff	3 (50,0%)	3 (50%)	0 (0%)
Fungsional	1 (8,3%)	8 (66,7%)	3 (25,0%)
Struktural	8 (15,7%)	35 (68,6%)	8 (15,7%)
Total	12 (17,4%)	46 (66,7%)	11 (15,9%)

Sumber : Output SPSS diolah penulis, 2026

Temuan dalam hasil *crosstab* menunjukkan bahwa posisi operasional memandang peluang kecurangan lebih tinggi dibanding posisi struktural. Akses langsung terhadap proses administratif pada jabatan fungsional meningkatkan persepsi adanya celah penyimpangan. Dalam perspektif GONE Theory, *Opportunity* merupakan faktor eksternal yang terkait dengan kelemahan struktural organisasi. Distribusi persepsi yang relatif tersebar mengindikasikan bahwa celah pengawasan

bersifat sistemik, tidak terpusat pada satu level kekuasaan formal.

c. Tabulasi silang jabatan dan *Need*

Tabel 4 *Crosstab* jabatan dan *need*

Jabatan	Rendah	Sedang	Tinggi
Staff	3 (50,0%)	3 (50%)	0 (0%)
Fungsional	4 (33,3%)	5 (41,7%)	3 (25,0%)
Struktural	23 (45,1%)	28 (54,9%)	0 (0%)
Total	30 (43,5%)	36 (52,2%)	3 (4,3%)

Sumber : Output SPSS diolah penulis, 2026

Pola ini menegaskan bahwa tekanan kebutuhan ekonomi tidak meningkat secara otomatis seiring posisi jabatan. Faktor *Need* lebih bersifat individual dan situasional dibanding struktural. Dalam kerangka *GONE Theory*, *Need* berfungsi sebagai tekanan ekonomi yang dapat memperkuat dorongan internal ketika kebutuhan dirasa tidak terpenuhi, namun risikonya tidak terdistribusi merata di seluruh struktur jabatan.

d. Tabulasi silang jabatan dan *exposes*

Tabel 5 *Crosstab* jabatan dan *exposes*

Jabatan	Rendah	Sedang	Tinggi
Staff	0 (0%)	0 (0%)	6 (100%)
Fungsional	0 (0%)		9 (75,0%)

Jabatan	Rendah	Sedang	Tinggi
		3 (25,0%)	
Struktural	1 (2,0 %)	32 (62,7%)	18 (35,3%)
Total	1 (1,4%)	35 (50,7%)	33 (47,8%)

Sumber : Output SPSS diolah penulis, 2026

Pola ini mengindikasikan bahwa pegawai pada level operasional memandang mekanisme pengawasan kurang efektif dibanding jabatan struktural. Persepsi bahwa pelanggaran berpotensi tidak terungkap lebih kuat pada staf dan fungsional yang terlibat langsung dalam pelaksanaan administratif. Dalam perspektif *GONE Theory*, *Exposes* berperan sebagai faktor penghambat. Ketika risiko pengungkapan dipersepsikan rendah, hambatan moral dan psikologis melemah, sehingga efektivitas pengawasan organisasi menjadi elemen kunci dalam pencegahan korupsi, terutama pada level operasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis statistik deskriptif dan tabulasi silang terhadap variabel *Greed*, *Need*, *Opportunity*, dan *Exposes* dalam perspektif *GONE Theory*, penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi risiko korupsi merupakan hasil interaksi antara dorongan internal dan faktor struktural organisasi.

Variabel *Greed* berada pada kategori sedang, yang menunjukkan adanya kecenderungan kepentingan pribadi sebagai dimensi internal risiko. Variabel *Need* memperlihatkan distribusi yang tidak merata antarjabatan, mencerminkan tekanan kebutuhan yang bersifat individual dan situasional, bukan seragam secara struktural.

Sementara itu, *Opportunity* menegaskan adanya variasi peluang antarjabatan yang berkaitan dengan akses sumber daya, diskresi administratif, dan efektivitas pengawasan, sehingga risiko tidak tersebar secara merata dalam organisasi.

Variabel *Exposes* menunjukkan perbedaan persepsi terhadap kemungkinan terungkapnya pelanggaran, yang merefleksikan efektivitas mekanisme pengawasan sebagai faktor pengendali.

Secara konseptual, keempat variabel tersebut digunakan sebagai kategori analitis untuk memetakan dimensi risiko korupsi tanpa menguji hubungan kausal, melainkan sebagai alat interpretasi atas pola deskriptif yang ditemukan.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian dalam perspektif *GONE Theory*, rekomendasi

strategis diarahkan pada penguatan dimensi struktural yang terbukti lebih menonjol, khususnya *Opportunity* dan *Exposes*. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan perbaikan desain sistem guna mempersempit peluang korupsi dan meningkatkan probabilitas pengungkapan pelanggaran, serta pengembangan mekanisme pelaporan pelanggaran yang kredibel dan terlindungi.

Selain itu, pengawasan eksternal perlu diperkuat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap birokrasi. Keterlibatan masyarakat sipil, media, institusi pendidikan, dan sektor swasta dapat menciptakan tekanan akuntabilitas melalui jurnalisme investigatif, advokasi kebijakan, pendidikan antikorupsi, serta penerapan prinsip tata kelola yang bersih di luar sektor publik.

Penelitian ini terbatas pada pendekatan kuantitatif deskriptif yang menekankan persepsi responden. Oleh karena itu, studi lanjutan disarankan menggunakan pendekatan kualitatif atau metode campuran untuk menggali dinamika yang melatarbelakangi persepsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Alfatih, A. (2021). Buku panduan praktis penelitian deskriptif kuantitatif.

- Asari, A., dkk. (2023). *Pengantar Statistika*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Bologna, G. J., Lindquist, R. J., & Wells, J. T. (1993). *The Accountant's Handbook of Fraud and Commercial Crime*. Wiley
- Budiman, S. (2026). *Dialektika Birokrasi Pemerintahan*. Minhaj Pustaka.
- Hardani, dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Penulis. *Pustaka Ilmu*.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. University of California Press
- Isgiyata, Jaka & Indayani, Indayani & Budiyni, Eko. (2018). Studi Tentang Teori *GONE* dan Pengaruhnya Terhadap Fraud Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. 5. 31-42
- Jain, A. K. (Ed.). 2001. *The Political Economy of Corruption*. London: Routledge
- Lambie, G. W., & Haugen, J. S. (2019). Heintzelman *Greed Scale*©(HGS©) Theoretical Framework and Item Development
- Naya, J., & Yanti, H. B. (2020). Mendeteksi Kecurangan Melalui Teori *Gone* Menurut Persepsi Auditor Eksternal Dengan Pengalaman Kerja Sebagai Variabel Moderasi
- Puanandini, D. A., Maharani, V. S., & Anasela, P. (2025). Korupsi sebagai kejahatan luar biasa: Analisis dampak dan upaya penegakan hukum. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 4(1).
- Saputra, F., & Saputra, E. B. (2021). *Measures of corruption: Needs, Opportunity and rationalization*. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 2(1), 42-50
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta: Bandung
- Suryana, R. (2023). I'M *GONE* (Integrity Minimal, *Greed*, *Opportunity*, *Need*, *Exposure*) sebagai Penyebab Runtuhnya Tujuan Antikorupsi KPK. *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(1),